

## **Budaya, Relasi Kekuasaan dan Pengembangan Gaya Arsitektur: Preseden Rancangan Kawasan Kota Denpasar**

**Ida Bagus Gde Wirawibawa<sup>1\*</sup>, I Dewa Gede Agung Diasana Putra<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Udayana

DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i01.p05>

### **Abstract**

#### **Culture, Power Relations and Development of the Architectural Style: The Planning Precedent of Denpasar City**

A work of architecture has historical significance and serves as a cultural artifact. This work reflects the personality of a specific neighborhood or city. Identity carries a variety of connotations because it is a fundamental and necessary aspect of upholding cultural values and a nation's dignity. Rapid urbanization, on the other hand, frequently results in regional development that is unrelated to the region's historical factors or the sustainability of the region's culture. This paper seeks to establish an architectural precedent for developing a city area cultured as a heritage city by conducting field surveys and graphically analyzing architectural documents, as well as a historical analysis of power relations in the Denpasar urban area, particularly the former Denpasar palace area. In this case, a combination of traditional and colonial architectural styles is used as a design reference and precedent for the future development of urban areas.

**Keywords:** architectural style; cultural artifacts; traditional; power relations

### **1. Pendahuluan**

Sebagai sebuah artefak budaya, karya-karya arsitektur telah menjadi catatan penting sejarah peradaban karena menunjukkan identitas suatu wilayah atau kota. Identitas ini menjadi sangat penting bagi sebuah kawasan yang unik dan nilai-nilai keluhuran budaya. Dalam hal ini, identitas kolektif, yang menjadi ciri sebuah komunitas atau kelompok (Rao, Monin, and Durand, 2003; Weber, Heinze, and DeSoucey, 2008) dalam mencapai tujuan tertentu dan hasil yang serupa (Wry, Lounsbury, and Glynn, 2011). Mengembangkan sebuah identitas merupakan tantangan vital yang dihadapi untuk mengembangkan sebuah identitas budaya tersendiri di dalam sebuah kawasan untuk mempertahankan

\* Penulis Koresponden: [ib\\_wirawibawa@unud.ac.id](mailto:ib_wirawibawa@unud.ac.id)  
Artikel Diajukan: 5 Juli 2021; Diterima: 21 Maret 2023

kelestarian budaya (Erikson, 1968). Terkait dengan hal ini, berbagai studi maupun wacana publik berkembang pada seputar isu-isu melindungi budaya termasuk arsitektur tradisional dari ancaman perkembangan pembangunan dan modernisasi.

Perkembangan kehidupan perekonomian di Bali terutama disebabkan oleh perkembangan kepariwisataan mendorong dinamika perubahan budaya terutama di kawasan perkotaan (Adhika & Putra, 2021; Picard, 1996; Putra et al., 2019; Vickers, 1996). Kawasan perkotaan Bali mengakomodasi dinamika sosial ekonomi yang lebih luas seperti pertumbuhan penduduk yang cepat dan migrasi internal (Sudira, 2009), maupun rangkaian proses kontestasi kekuasaan dari masa ke masa, termasuk Kota Denpasar yang sarat dengan nilai-nilai sejarah budaya. Kontestasi kekuasaan ini telah meninggalkan jejak simbol yang menghubungkan, menggerakkan dan mengkomunikasikan praktik-praktik berkebudayaan masyarakat yang mempengaruhi identitas kolektif. Identitas ini juga menggambarkan bagaimana sebuah otoritas dilegitimasi (Monnet, 2011) yang mana sebuah otoritas selalu berusaha menciptakan identitas untuk mengungkapkan batasan dan kelebihanannya (Suyadnya, 2011) misalnya kemegahan maupun kekhasan produk-produk arsitektur. Dengan pesatnya pengaruh budaya luar dan globalisasi yang menerpa perkotaan Bali, sejauh mana budaya luar dan kontestasi kekuasaan mempengaruhi identitas budaya lokal terutama karya arsitektur di kawasan perkotaan Bali terutama kota Denpasar?

Untuk mengeksplorasi hal ini, investigasi kesejarahan dan dokumentasi arsitektur diterapkan, dimana berbagai dokumentasi arsitektur dianalisis dengan cara grafis. Artikel ini berupaya mengeksplorasi peninggalan-peninggalan arsitektur dalam sebuah perkotaan sebagai sebuah artefak budaya, dapat menunjukkan identifikasi status sosial budaya, ekonomi, dan relasi kekuasaan maupun kondisi perpolitikan di masa bangunan itu sendiri (Kraft, 2013). Kekuatan sebuah otoritas kekuasaan dapat dibaca dengan mengamati elemen-elemen arsitektur maupun metode praktek-praktek membangun, termasuk bentuk, skala, gaya, detail, dan ornamen (Ismail and Alice, 2008; Ismail, 2014). Dalam hal ini, perkotaan Bali terutama Denpasar diwarnai dengan pembangunan yang cepat dari berbagai fungsi bangunan seperti perkantoran, sektor ekonomi maupun perumahan di sepanjang jalan utama Denpasar, dan laju konversi lahan sawah sporadis yang cepat untuk mengakomodasi pembangunan perkotaan. Lebih lanjut, artikel ini berupaya untuk menginventarisasi karya-karya heritage arsitektur yang dipergunakan sebagai sebuah referensi atau preseden pengembangan kota berwawasan budaya.

## 2. Literatur Review

### 2.1 Pendekatan Budaya dalam Perancangan Kota

Pembangunan merupakan kebutuhan mutlak bagi semua bangsa yang ingin membentuk suatu masyarakat modern. Pembangunan menimbulkan ekspansi di segala bidang sehingga perubahan-perubahan perilaku dari masyarakat tak terhindarkan. Ada dua elemen prinsip dalam proses ini yaitu industrialisasi dan urbanisasi (Harahap, 2013; Setyowati, 2011). Industrialisasi, yang diawali dengan penemuan mesin uap pada abad 18, dimulai di negara-negara barat seperti Inggris, Eropa dan Amerika Utara. Penemuan mesin uap ini telah menyebabkan perubahan yang fundamental dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi (Noviyanti, 2021). Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam organisasi spatial dan sosial, mempertentangkan kekayaan dan kemiskinan, merubah fungsi-fungsi permukiman menjadi komersial dan industri. Pengembangan industrialisasi dapat menyebabkan perkembangan kota dimana perkembangan yang tidak terencana dengan baik disinyalir menciptakan ketidakteraturan dalam organisasi kota dan penurunan kualitas hidup, kualitas visual, fungsional dan lingkungan (Yulianto and Wibowo, 2017).

Fenomena ini juga terjadi pada kota-kota dunia ketiga termasuk Indonesia dalam konteks yang berbeda. Di negara-negara ini, urbanisasi terjadi akibat meningkatnya tenaga kerja pedesaan dan menurunnya produktivitas sektor pertanian, sehingga terjadi banyak pengangguran di pedesaan. Akibatnya, masyarakat pergi ke kota serta mencari pekerjaan. Karena industri memerlukan tenaga kerja yang kompeten, hanya sedikit dari mereka yang terserap di sektor tersebut (Harahap, 2013). Peningkatan populasi menyebabkan kota menjadi padat. Terciptalah kawasan-kawasan urban, namun tanpa perubahan perilaku dari warganya (Tjiptoherijanto, 2016). Oleh karena itu, kampung kota banyak tumbuh dalam kota-kota di dunia ketiga (Nursyahbani and Pigawati, 2015).

Pembangunan memang secara ekonomi memperbaiki kualitas hidup manusia. Namun pendekatan yang mengabaikan budaya seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan (Dua, 2017). Dalam hal ini, jatuhnya perekonomian tidak akan menyebabkan konflik pada nilai dan budaya setempat jika dilakukan pendekatan yang baik terhadap sistem nilai masyarakat dan budaya ekonomi lokal pada pembangunan. Tempat terjadinya aktivitas budaya kolektif dan publik memiliki pengaruh penting terhadap bentuk dan fungsi kota. Pada tingkat yang paling terintegrasi, budaya telah memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat yang berbeda dan dalam model desain perkotaan, dari berbagai era klasik, renaissance, industri dan pasca-industri di seluruh dunia (Evans, 2001).

Kota-kota di dunia Timur dalam pemikiran orang-orang Barat dianggap sebagai perdesaan yang terbentuk sebagai bentuk organisasi sosial yang kuno. Kota-kota di Asia dipahami sebagai desa karena masyarakatnya selalu mempresentasikan peraturan-peraturan kuno yang dianggap sudah hilang (Muijzenberg, Otto, and Wolters, 1988). Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa kata desa di Bali tidak dapat dilepaskan dari sebuah kawasan walaupun berada di kawasan perkotaan. Sebaliknya, kota-kota baru modern terutama di kawasan negara-negara Barat adalah merupakan unit-unit administrasi dimana tiada tempat untuk keistimewaan atau identitas lokal (Nordholt, 1991). Oleh karena itu, kota bagi orang timur bukan hanya berupa bentuk fisik semata, dimana sebuah kawasan kota masih mempunyai dimensi simbolik dalam konteks ritual masyarakat yang memiliki makna yang kompleks. Dalam hal ini, kontradiksi antara pemikiran Barat dan Timur terkait dengan kota sehingga tercipta pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam perencanaan pembangunan.

Kebijakan perkotaan yang berwawasan budaya merupakan kerangka pendekatan utama dalam pengembangan model pembangunan berbasis budaya. Dalam hal ini, periodisasi, termasuk didalamnya periodisasi relasi kekuasaan di dalam sebuah kawasan sangatlah penting dalam mengembangkan sebuah kebijakan pengembangan sebuah kota (Pier Luigi Sacco and Crociata, 2013). Oleh karena itu, sejarah dan kualitas wacana publik tentang budaya dan tingkat partisipasi budaya aktif masyarakat lokal menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan kebijakan sebuah kawasan kota. Semakin tinggi partisipasi maupun semakin proaktif dan transformasional masyarakat, maka semakin dinamis kebijakan pengembangan dan pendekatan pengembangan perkotaan. Berdasarkan dinamika masyarakat itu, maka semakin banyak khalayak umum yang berhasil mengakses pengalaman dan peluang budaya, semakin tinggi tingkat masyarakat dalam menghargai dan manfaat pengembangan kota berwawasan budaya. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat itu, maka semakin tinggi tingkat kesediaan masyarakat dalam mendukung pengembangan budaya dalam perencanaan kawasan perkotaan (Sacco, Blessi, and Nuccio, 2009). Partisipasi masyarakat ini terkait dengan peran budaya yang merupakan mediasi antara manusia dan alam, dan memberikan peluang pembangunan bagi masyarakat dalam mengaktualisasikan diri dalam perbedaan-perbedaan dengan orang atau kelompok lain (Claval, 1995).

## ***2.2 Kota dan Budaya***

Kota merupakan siklus budaya manusia yang tidak ada habisnya, dan dengan demikian kota sendiri akan menciptakan budaya baru dan lama (Miles, 2007). Seringkali praktik perencanaan kota masih sangat bergantung pada

pendekatan fisik sehingga menyebabkan pergeseran ruang-ruang sosial dari penghuninya. Perencanaan kota seringkali memiliki kiblat ke perencanaan kota-kota baru modern di negara-negara maju sehingga berbagai perencanaan kota di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dan Bali cenderung merubah berbagai potensi lokal yang ada. Perkembangan ini merupakan akibat dari *eurocentrisme* dalam perencanaan kota (Prestel, 2016). Oleh karena itu, penataan kota dengan konsep nilai budaya merupakan alternatif lain yang merupakan salah satu solusi atas permasalahan sosial budaya yang muncul dalam dimensi spasial. Sangat penting bahwa budaya kota menjadi bagian mendasar dan integral dari perencanaan kota (Charles Landry, 2006). Perencanaan kota yang sukses dapat dilihat ketika aspek fisik dan non-fisik kota dipertimbangkan dengan cermat. Kondisi budaya dan sosial masyarakat ada dalam bentuk fisik kontemporer, dan orang-orang di masyarakat mampu mengenali lokasi dan budaya lokal yang terkait dengan tempat tinggal mereka (Lefèbvre, 1992; Gleeson, 2003).

Di era globalisasi saat ini, banyak kota telah mulai memasukkan aspek budaya sebagai sarana yang disukai untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Kota-kota di berbagai belahan dunia telah memulai strategi untuk memobilisasi sumber daya budaya mereka untuk membantu mendapatkan investasi, menarik pengunjung, memperkuat identitas regional, dan mendorong dukungan lokal untuk program regenerasi (Griffiths, 2006). Dalam hal ini, kota merupakan salah satu bentuk dari budaya yang menggambarkan keadaan sosial, ekonomi dan politik tertentu. Arti penting politik yang berkembang dari lingkup budaya tampaknya telah disertai oleh, dan dalam beberapa hal telah membantu menghasilkan banyak kebingungan konseptual dan pergeseran terminologis. Hal ini dapat dilihat dengan cara di mana gagasan tentang seni telah tergeser oleh gagasan sektor budaya yang lebih luas. Sektor budaya pada gilirannya menjadi industri budaya; dan industri budaya telah berubah menjadi industri kreatif. Gagasan tentang peran sumber daya budaya dalam mendorong kota kreatif (Landry, 2000), dalam kebangkitan ekonomi perkotaan (Florida, 2002).

Budaya, sejak 1980-an, telah memainkan peran yang semakin meningkat dalam strategi regenerasi perkotaan dan pembangunan ekonomi lokal (Colomb, 2011) yang mana telah terjadi peningkatan signifikansi strategis yang melekat pada bidang budaya (Griffiths, Bassett, and Smith, 2003). Hal ini dibuktikan dengan strategi yang signifikan pada kebijakan budaya dan acara budaya (Griffiths, 2006; Garcia, 2004) di mana inisiatif budaya telah menarik wisatawan, investasi dan pekerjaan (Miles and Paddison, 2005; Pratt, 2010; Stevenson, 2004). Transformasi budaya menjadi sumber daya ekonomi (Tretter, 2009) yang dikemas dalam prioritas industri budaya dan kreatif (Amin and Thrift,

2007; Castree, 2004). Seiring waktu, pendekatan budaya digunakan untuk mengurangi berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan politik (Gibson and Stevenson, 2004) dimana kegiatan budaya menjadi pendukung pengembangan ekonomis (Immler and Sakkers, 2014; Lähdesmäki, 2014).

Faktor budaya dalam pengembangan sebuah kota telah menghasilkan berbagai variasi wajah kota yang berbeda satu dengan lainnya sehingga satu kota tidak sama dengan kota lainnya. Kota dapat juga diartikan sebagai sebuah kreasi budaya. Dalam kerangka ini, kota adalah sebuah signifikansi budaya dari proses sosial. Hal ini dipahami sebagai kesatuan dari faktor-faktor sosial ekonomi dan sosial politik dari suatu masyarakat. Dalam hal ini, budaya memiliki peran besar dalam *branding* sebuah kota. Tingkat daya tarik dan daya saing kota tergantung pada sumber daya budaya dan tingkat perkembangan budayanya (Bıçakçı, 2012). Oleh karena itu, kehidupan budaya yang dinamis merupakan salah satu prasyarat utama dalam *branding* sebuah kota (Zhuanqing, 2010). Penggunaan budaya dalam pemasaran kota dan *city branding* menjadi salah satu tren utama akhir-akhir ini. Hubungan antara budaya dan pemasaran kota tergantung pada citra kota yang terkait dengan budaya masa lalu dan masa kini dan dari ketergantungan keunggulan kota pada identitas kota yang tersembunyi dan terungkap (Kavaratzis, 2011).

Budaya dalam bentuk fasilitas dan acara budaya, arsitektur dan sejarah perkotaan berperan penting dalam membentuk dan mempertajam citra kota, sehingga menjadi alat strategis bagi mereka yang mendapatkan manfaat dari refleksi positif dari sebuah identitas kota. Identitas ini akan menjadi sebuah kehidupan budaya yang dinamis yang merupakan salah satu prasyarat utama dalam *branding* sebuah kota (Zhuanqing, 2010). Hubungan antara budaya dan pemasaran kota terutama berasal dari ketergantungan citra kota pada budaya kota masa lalu dan sekarang dan dari ketergantungan merek kota pada identitas kota yang tersembunyi dan terungkap (Kavaratzis, 2011).

Konsep rekontekstualisasi hasil integrasi budaya dalam perencanaan kota secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan makna nilai budaya yang digunakan dalam proses penataan ruang. Salah satu metode transformasi dapat berupa pengenalan nilai-nilai baru, atau kemunculan kembali nilai-nilai lama yang terkait dengan konteks budaya yang lebih responsif dan aplikatif pada kondisi kontemporer yang lebih langgeng. Isu sentral dalam integrasi nilai-nilai budaya fisik dan non fisik dalam penataan ruang adalah apakah kebijakan publik yang ada dapat mendukung proses pengintegrasian nilai-nilai tersebut. Integrasi nilai-nilai budaya lokal, yang mengubah makna nilai-nilai budaya yang digunakan dalam proses penataan ruang, dapat dilakukan dengan mengubah nilai-nilai baru atau mengembalikan nilai-nilai lama (Van Oers, 1998). Agar nilai-nilai budaya yang relevan secara kontekstual dapat dikontekstualisasikan

kembali, desainnya harus mempertimbangkan paradigma saat ini, khususnya dalam penataan ruang, di mana tidak lagi mengarah pada nilai-nilai budaya terkait serta mengutamakan faktor ekonomi tetapi lebih menekankan pada hubungan yang saling berhubungan.

### 3. Metode dan Teori

Sebagai sebuah kajian kesejarahan dalam arsitektur dan perencanaan kawasan dan kota, artikel ini menggunakan kajian kesejarahan perkembangan kota dan arsitektur sebagai titik tolak dalam mengeksplorasi kawasan. Investigasi lapangan dilakukan untuk memahami fenomena identitas kota dan upaya inventarisasi dan dokumentasi arsitektur untuk melakukan analisis grafis sebagai upaya pengembangan dan perencanaan kawasan kota.

Peninggalan-peninggalan arsitektur pada setiap periode kekuasaan yang terjadi di sebuah kawasan diidentifikasi untuk melihat karakter atau ciri-ciri arsitektur yang dihasilkan oleh sebuah kekuasaan. Hal ini yang dipergunakan untuk menganalisa hubungan kekuasaan perpolitikan dengan bentuk-bentuk arsitektur tertentu. Hal ini sangat penting dilakukan, sehingga keterkaitan antara relasi kekuasaan di sebuah kawasan dan perkembangan dan perubahan artefak-artefak budaya kota dan arsitektur dapat dikaitkan satu dengan lainnya sebagai referensi dalam melakukan pengembangan kota di masa mendatang.

Dalam pengembangan kota ini dilakukan dengan melakukan analisa preseden dimana artefak-artefak arsitektur sebuah kawasan dipergunakan sebagai referensi dalam pengembangan kawasan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menerapkan teori Klaasen dan Witberg tentang analisis preseden (Klaasen and Witberg, 1993), yang menunjukkan peran sebuah proses perubahan yang menjadi luaran preseden arsitektur. Analisis preseden ini juga dapat dianggap sebagai bentuk dari apa yang disebut sebagai praktik reflektif' (Schön, 2009).

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 *Budaya Bali dan Kontestasi Kekuasaan*

Setelah Bali ditaklukkan oleh Majapahit pada abad ke-14, Gelgel (setelah pindah dari Samprangan) menjadi kerajaan utama memerintah Bali, dan kerajaan lainnya hanya sebagai istana independen sekunder, seperti Badung, Bangli, Tabanan, Karangasem dan Gianyar (Geertz, 1980). Namun, karena Gelgel tidak dapat menengahi konflik antara kerajaan independen sekunder, istana sekunder diberi lebih banyak kekuatan untuk mengelola wilayah mereka. Di wilayahnya, kerajaan sekunder berusaha menciptakan identitasnya sendiri untuk mengekspresikan batas dan keunggulannya dengan tradisi, aktivitas budaya, dan gaya arsitektur yang berbeda dari yang lain. Dalam hal ini, karya

arsitektur adalah salah satu komponen kunci yang mengekspresikan identitas khas suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu.

Prinsip-prinsip arsitektur terus fokus pada campuran bentuk dan warna sebagai teknik dasar yang dipilih oleh desainer untuk membangun dan menghadapi berbagai kritik (Gauldie, 1969). Pada awalnya, karya arsitektur hanya sebagai sebuah tempat perlindungan. Namun, karena tuntutan perubahan masyarakat dan peningkatan keterampilan membangun, produksi arsitektur telah berkembang menjadi sebuah alat mengkomunikasikan pesan. Arsitektur dapat dilihat sebagai penghubung antara budaya dan peran simbolik dari bentuk yang dibangun yang dapat mencerminkan perubahan sosial dan peradaban masyarakatnya (Firzal, 2020). Bentuk arsitektur dapat digunakan untuk memediasi interaksi sosial dan memecahkan masalah sosial dalam rangka membangun hubungan sosial dan menghadirkan realitas baru (Dovey, 2009).

Sebuah produksi arsitektur merepresentasikan dan mencerminkan kekhasan yang berbeda dengan arsitektur di kawasan lainnya. Hal ini termasuk gaya arsitektur yang dapat dilihat sebagai citra kawasan dan kekhasan sebuah budaya bagi orang luar (Seramasara and Trisnawati, 2019). Gaya arsitektur Kerajaan Badung yang sering disebut *bebadungan*, yang menggunakan batu bata untuk seluruh bagian bangunannya, berbeda dengan gaya arsitektur Gianyar yang disebut *gegianyaran*, yang menggunakan kombinasi batu bata dan padas sebagai bahan bangunan (Putra et al., 2013; Satria & Putra, 2020). Karakter ini dirancang untuk menunjukkan identitas dan membuat bentuk bangunannya menjadi berbeda dengan yang lainnya. Dalam hal ini, identitas adalah definisi yang jelas dari homogenitas kelompok, yang berarti memiliki status tinggi (Brubaker & Cooper, 2000; Putra & Wirawibawa, 2020).

Perkembangan budaya Badung tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang panjang dari Kerajaan Badung yang tidak bisa lepas dari peran tiga *puri* utama yaitu Puri Pemecutan, Puri Satria dan Puri Kesiman (Agung et al., 1986). Keberadaan kerajaan ini tidak terlepas dari peran I Gusti Ngurah Sakti Pemecutan yang membebaskan wilayah Badung dari kekuasaan kerajaan Mengwi yang lebih mapan di Bali Tengah pada pertengahan abad kedelapan belas (Agung et al., 1986) dengan pusatnya di Puri Pemecutan di sebelah Barat Sungai Badung. Kerajaan Badung kemudian berkembang dengan pesat dan mencapai puncaknya pada pertengahan Abad ke-19 (Tarnutzer, 1995). Kerajaan Badung semakin meluas dimana selanjutnya di bangun dua istana baru yaitu di Utara dan Timur Laut yang melintasi Sungai Badung (Agung, 1986). Hal ini dilakukan karena wafatnya I Gusti Ngurah Sakti Pemecutan, sehingga Badung dibagi menjadi tiga wilayah, masing-masing dikuasai oleh ketiga putranya. Putra tertua, I Gusti Ngurah Made Pemecutan tinggal di Puri Pemecutan,

sedangkan adik-adiknya tinggal di Puri Satria, di seberang Sungai Badung di sebelah utara, dan Puri Kesiman, lebih jauh ke timur menuju Sanur (Agung et al., 1986).

Seiring dengan perkembangan Kawasan Badung, Raja Badung kemudian membangun istana baru di taman kerajaan. Namun, berbeda dengan taman-taman pada umumnya, taman tersebut merupakan tempat favorit Raja Badung saat itu, untuk bermain sabung ayam yang biasanya mengundang raja-raja di Bali (Sasmita, 2020). Nama Denpasar sendiri berasal dari dua kata, *den* yang berarti Utara, dan pasar. Nama itu diberikan pada taman kerajaan karena terletak di sisi utara pasar. Di taman ini raja kemudian membangun Puri Denpasar setelah kematian ayahnya di Kerajaan Badung pada tahun 1788 (Yudiantini, Darma, and Wiryawan, 2017; Triyuni, Ginaya, and Suhartanto, 2019). *Puri* baru ini menerapkan pola *catus patha/pempatan agung* sebagai pengaruh dari perencanaan kota selama pengaruh Kerajaan Majapahit.

Puri Denpasar ini selanjutnya memegang peranan penting seiring dengan penguasaan kawasan Kerajaan Badung oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Bali setelah Puputan Badung 1906. Semenjak itu Kota Denpasar berubah fungsi dari kota kerajaan tradisional menjadi kota kolonial. Bentuk Kota Denpasar mengarah pada percampuran bentuk perkotaan di wilayah Eropa dengan tradisi dari penduduk dan masyarakat lokal (Brunn and Williams, 1983). Dalam hal ini, ciri dari perpaduan ini adalah pemilihan kota yang cenderung pembangunan kawasan pemukiman penduduk pendatang, perkantoran dan instansi pemerintahan, kawasan pedagang, dan tempat tinggal para pemimpin tradisional masyarakat. Sementara itu secara fungsional, kota kolonial lebih menonjolkan fungsi komersial (McGee, 1967).

Perkembangan kawasan sekitar Puri Denpasar tahun 1906 membentuk sumbu *pempatan agung* yang demikian dominan. Pada *pempatan*-nya terjadi pelebaran ruang membentuk core atau inti yang berfungsi terutama untuk kegiatan ritual dan pasar atau keramaian di pusat kerajaan. Setelah diduduki oleh Belanda terjadi perubahan fisik, terutama pada sudut Tenggara *pempatan agung* yang semula masih terdapat beberapa rumah keluarga puri telah berubah menjadi lapangan.

Saat terjadi *puputan*, *puri* hancur dan dijadikan kantor residen, sementara beberapa rumah tinggal keluarga *puri* dan pasar diubah menjadi alun-alun. Seperti halnya kawasan lainnya yang mendapatkan pengaruh yang besar dari pemerintah kolonial (Worsley, 2019), nampak jelas intervensi kolonial dalam menata kawasan pusat kota Denpasar mengikuti pola grid. Walaupun sumbu *pempatan agung* tetap dipertahankan dengan bentukan dimensi berbeda. Namun, terlihat adanya pergeseran peran dari filosofi *catus patha* sebagai titik pusat kota digantikan oleh dominasi alun-alun. Gejala ini diperkuat dengan

berpindahannya pusat kegiatan masyarakat di ruang terbuka, sebab sumbu silang yang sarat makna religi tersebut diprioritaskan untuk lancarnya arus kendaraan, tidak lagi mendahulukan kepentingan kegiatan adat dan budaya setempat. Secara tradisional, *catus patha* tidak hanya menjadi intersection suci tetapi juga terkait dengan statusnya sebagai pusat kerajaan. Sebagai pusat kerajaan, dan kawasan sekitar *puri* adalah pusat wilayah negara, *catus patha* adalah pusat negara (Putra, 2005).

Perkembangan Kota Denpasar pada masa kolonial merupakan perpaduan antara konsep arsitektur modern dengan arsitektur tradisional. Dengan tetap mempertahankan kekuatan *catus patha* dipadukan penempatan sebuah jam di pusat *catus patha*. Hal ini merupakan upaya pemerintah kolonial memperkenalkan konsep waktu secara modern terkait dengan menentukan waktu karena masyarakat masih berpedoman pada tanda-tanda alam (Triyuni, Ginaya, and Suhartanto, 2019).

#### **4.2 Perkotaan Bali dari Pusat Kerajaan menuju Kota Kolonial**

Bali melihat alam semesta melalui pandangan dunia Hindu dimana semesta dipercaya sebagai makrokosmos, dan manusia adalah mikrokosmos, sejalan dengan ideologi yang menempatkan keduanya memiliki nilai dan ciri yang sama. Satu komponen akan mencerminkan yang lain sehingga fokus dari budaya Bali adalah harmonisasi baik hubungan manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia maupun lingkungan dengan menerapkan konsep *tri hita karana* (Budihardjo, 1986; Gelebet, 1998; Parimin, 1986). Di desa-desa adat dan bangunan Bali, prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam aturan sakral-profane (*utama, mada, nista*) dan berfungsi sebagai struktur tata ruang hierarkis (*sanga mandala* dan *tri angga*). Hirarki ini tercermin dari penempatan tempat-tempat suci baik secara regional, desa maupun di rumah-rumah penduduk sebagai alam semesta surgawi yang menempati tingkat utama.

Cara yang lebih jelas untuk menyajikan konsep di atas adalah dengan mengatakan bahwa struktur ruang tradisional tempat suci mencakup unsur-unsur wilayah Bali, desa adat, *banjar* adat, dan pekarangan rumah. Deskripsi konsep ini menunjukkan bahwa istilah kota tidak secara eksplisit dimiliki oleh masyarakat Bali. Meskipun demikian, kata-kata terkenal seperti *kuta*, *kutanegara*, pura atau *pur* yang semuanya menggambarkan benteng dalam bahasa Sansekerta, memiliki arti dan lebih mengacu pada pusat pemerintahan (istana raja). Pada masa kerajaan, pergi ke kota berarti bepergian ke jantung kekuasaan. Oleh karena itu pusat-pusat kerajaan dianggap sebanding dengan kota, yang terdiri dari adanya istana raja, alun-alun dan pasar (Wirjomartono, 1995) termasuk juga kawasan *puri* di Bali.

Pusat kerajaan akhir abad kesembilan belas di Bali, merupakan pemukiman sekitar *puri* yang secara ciri-ciri fisiknya ditafsirkan sebagai contoh lingkungan desa. Pusat-pusat kerajaan seperti ini dan karakteristik sosial-politiknya belum secara khusus ditafsirkan sebagai pedesaan atau perkotaan. Dengan memperbandingkan dengan kota-kota kraton di Jawa, yang diidentifikasi memiliki fungsi permukiman sebagai pusat kehidupan ritual dan sekuler dari berbagai kelas warga kerajaan (Wertheim and Kraal, 1958), maka kondisi dan ciri-ciri kota kerajaan di Bali berupaya untuk diidentifikasi. Dalam hal ini sistem perkotaan di Bali dapat diidentifikasi dengan pengaturan tata guna lahan yang kompleks, peran sentral dan usaha pasar yang semarak, serta sebagai tatanan peran sipil dan ritual.

Terlepas dari kurangnya pembahasan dan pemahaman tentang kondisi perkotaan sebagai pusat kerajaan Hindu Bali, studi tentang sejarah politik pra-kolonial memberi interpretasi tentang kondisi perkotaan pra-kolonial. Dalam hal ini perkotaan pra kolonial memperhitungkan fungsi sosial-ekonomi dan politik yang berlangsung di kawasan sekitar *puri* dan kadang-kadang menggambarkan elemen tertentu dari lingkungan binaan yang dapat merepresentasikan kondisi perkotaan dan karakteristik permukiman istana kerajaan Bali (Nordholt, 1986). Fungsi arsitektur perkotaan pusat-pusat kerajaan sebagai pusat kehidupan ritual dan sekuler, menunjukkan bagaimana pusat kerajaan berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penguasa dan bangsawan pendukungnya maupun rakyatnya, antara keraton dan *banjar* sekitarnya (satuan lingkungan adat) yang mengikuti ritual patronase *puri*, dan antara pedagang dengan klien dan pembelinya (Geertz, 1980; Nordholt, 1986; Wiener, 1995).

Seiring dengan penguasaan Bali oleh kolonial Belanda, model distrik administrasi Belanda diterapkan mulai dari *residentie-afdeling-onderafdeling* (kabupaten), *district* (kota), *perbekelan* (desa dan banjar administratif) (Achmadi, 2010). Sistem ini dibangun untuk mengurangi pengaruh kekuasaan lokal dan memperluas pengaruh pemerintah kolonial. Kota ini berfungsi sebagai pusat ekonomi dan bisnis, dimana pemukiman orang Arab, Cina, dan orang asing lainnya ditempatkan sekitar kawasan perdagangan, sedangkan penduduk asli berada disekitarnya.

Terlepas dari kondisi yang baru karena pengaruh budaya baru, pengembangan kawasan kota masih mengikuti aturan kosmologi dalam hal membangun desa dan rumah tradisional. *Asta bumi*, *asta kosali*, *asta kosala*, *janantaka*, *brahma kerti* dan *dewa tattwa* semuanya digunakan sebagai aturan yang diturunkan oleh Wiswakarma. Bahkan, sampai saat ini, pendekatan ini masih tetap dijunjung tinggi.

Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman, kawasan ini juga mengalami perubahan yang mengikuti kemajuan teknologi. Transformasi ini berupa

penataan ulang yang radikal dari pusat sipil dan pengembangan pemukiman dan pusat kerajaan sebelumnya. Dimulai dengan pembangunan jaringan jalan grid kota kolonial mempertahankan pola yang sudah terbentuk pada masa kerajaan Badung. Alun-alun yang ada saat ini merupakan perluasan dari pasar kerajaan yang memang secara tradisional merupakan ruang terbuka. Alun-alun ini kemudian diperluas ke arah selatan dengan merobohkan beberapa rumah bangsawan di selatan Puri Denpasar (Achmadi 2010). Di bagian Barat Puri Denpasar dibangunlah akomodasi wisata pertama di Bali Selatan, Hotel Bali, dibangun pada tahun 1927 (Agung et al., 1986) yang mendapatkan sentuhan *art deco* (Handinoto, 1996; Paramitha, Kastawan, and Widiastuti, 2017). Di sekitar kawasan ini kemudian dibangun berbagai fasilitas perkantoran, perdagangan dan perumahan.

Perluasan wilayah perkotaan Denpasar disertai dengan perkembangan perumahan yang signifikan. Pertumbuhan penduduk yang cepat, akibat migrasi pedagang Jawa, Cina, dan Arab, bersama dengan migrasi Bali, mendorong pembangunan perumahan dan juga mengubah lanskap sosial ekonomi kota (Tarnutzer, 1995; Hardy, Setiawan, and Prayitno, 2016). Meningkatnya jumlah pedagang Cina dan Arab (gabungan pedagang Asia Selatan dan Timur Tengah) untuk mendirikan toko, seiring dengan pemindahan pasar kerajaan ke arah Barat dekat dengan Sungai Badung (Agung et al., 1986).

Kawasan perdagangan di sepanjang jalur ini yang dikenal dengan kawasan Jalan Gajah Mada berkembang menjadi pusat perdagangan Kota Denpasar penting di masa lalu. Seiring dengan perkembangan Kota Denpasar yang semakin pesat, berbagai sarana dan prasarana di kawasan mulai menemukan titik jenuh, dan berbagai pusat bisnis mulai menyebar ke wilayah lainnya. Dalam hal ini mulailah muncul pusat perbelanjaan yang modern dengan sistem swalayan. Dengan dipindahkannya pusat pemerintahan Bali ke kawasan Renon menyebabkan mulai bergesernya pusat perekonomian masyarakat ke wilayah lainnya. Walaupun demikian, keberadaan deretan pertokoan yang ada masih tetap memiliki ciri khas yang menjadi identitas kawasan dan menjadi bukti sejarah akan ketenarannya di masa lalu.

#### ***4.3 Identitas Arsitektur Kawasan dan Preseden Rancangan***

Preseden dalam arsitektur dilakukan untuk mengekstrak beberapa nilai yang hilang, yang ditemukan dalam sebuah warisan arsitektur dalam sebuah kawasan. Dalam hal ini prinsip-prinsip dan karakter arsitektur dieksplorasi sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengembangan arsitektur di kawasan sehingga tidak kehilangan identitas budaya kawasan. Nilai-nilai maupun prinsip ini dapat digunakan dalam membangun ruang lingkup dalam arsitektur berkelanjutan. Konsep kualitas yang berasal dari kode arsitektur masa lalu menunjukkan bahwa arsitektur sangat menghormati lingkungan.

Analisis preseden sudah dikenal dan telah digunakan dalam hukum dan administrasi bisnis untuk beberapa waktu yang dipergunakan dalam konteks konteks desain pada konferensi desain di Delft (Tzonis, 1992). Model seperti ini sebelumnya dikenal sebagai analisis rencana (Klaasen and Witberg, 1993). Analisis preseden ini juga dapat dianggap sebagai bentuk dari apa yang disebut sebagai praktik reflektif' (Schön, 2009). Dalam analisis preseden refleksi tidak langsung dalam tindakan tetapi berdasarkan kerangka analitis eksplisit. Konsep ini semakin dikenal dan digunakan dalam disiplin desain seperti desain industri (Pasman, 2003), dan arsitektur (Guney, 2008).

Arsitektur dapat dilihat sebagai sebuah proses perubahan, mengubah sekumpulan masukan menjadi luaran. Proses ini menciptakan bangunan melalui empat aspek yang berhubungan dengan masalah sosial budaya, ekonomi, lingkungan dan desain (Vakili-Ardebili and Boussabaine, 2006). Dalam proses ini, teknologi dan kerangka konseptual adalah dua faktor penting yang menyeimbangkan aspek-aspek yang diperlukan untuk keseimbangan konteks desain. Penerapan teknologi dan strategi khusus dalam konsep desain serta pemilihan bahan dan sumber energi yang bijaksana dapat mengurangi laju dampak lingkungan. Oleh karena itu, manajemen proses pada umumnya dan manajemen keluaran pada khususnya dibahas dalam tahap desain. Ada banyak pelajaran, pemikiran dan filosofi dalam karya preseden dalam pendidikan jangka panjang arsitektur, yang dapat terlibat dalam pengalaman proyek saat ini.

Bentuk dan tampilan bangunan di kawasan ini secara umum menampilkan unsur-unsur *triangga*, akan tetapi penerapannya dengan proporsi dan karakter berbeda. Pada bangunan perkantoran terlihat nuansa arsitektur tradisional Bali masih menerapkan unsur kepala, badan dan kaki pada bangunannya dengan memanfaatkan bahan bangunan dengan batu alam, sedangkan untuk bangunan dengan fungsi bisnis dan perdagangan, umumnya bergaya *art deco* seperti halnya Hotel Bali di Jalan Veteran sebagai peninggalan pada saat dibangun dahulu. Sementara itu, bentuk-bentuk pertokoan sebagai salah satu bangunan dengan fungsi bisnis, menampilkan bentuk baru dengan atap plat datar. Akan tetapi untuk pertokoan yang baru sudah mulai memanfaatkan atap limasan sebagai upaya pendekatan terhadap atap arsitektur tradisional Bali.

Melihat kondisi seperti ini, sejak tahun 2008 kawasan ini dirancang sebagai kawasan *heritage* ditandai dengan pemasangan tanda keberadaan kawasan sebagai kawasan *heritage* yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan kota pusaka pada tahun 2011 (Yusiana, 2016). Seiring dengan hal ini, maka pengembangan arsitekturnya ditetapkan sebagai kawasan dengan bangunan arsitektur Bali kecuali bangunan yang telah ada sebelumnya dan telah berusia lebih dari 50 tahun dan layak untuk dikonservasi tetap dengan gaya

bangunannya. Dengan keberadaan ini pengembangan arsitektur di kawasan ini memadukan unsur-unsur bangunan *art deco* dengan memanfaatkan ciri-ciri yang dimiliki bangunan di kawasan ini sebagai preseden rancangan (Foto 1 dan 2) dan dipadukan dengan bahan bangunan alamiah yang memiliki karakter yang sesuai dengan corak/gaya bangunan yang dijadikan preseden bangunan tersebut.



Foto 1. Beberapa ornamen yang dapat dijadikan preseden rancangan (Foto: I Dewa Gede Agung Diasana Putra).



Foto 2. Beberapa fasade bangunan yang dapat dijadikan preseden rancangan (Foto: I Dewa Gede Agung Diasana Putra)

Selain model *art deco*, di kawasan perkotaan ini juga masih terdapat beberapa bangunan tradisional peninggalan masa lalu yang menunjukkan

bangunan tradisional Bali. Keberadaan bangunan tradisional Bali juga disadari oleh pemerintah kolonial dalam upayanya untuk mempertahankan kebudayaan Bali yang adiluhung dengan melakukan perencanaan dan pembangunan museum yang kental dengan arsitektur Bali. Disamping itu juga keberadaan Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar (Foto 3) merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari segi arsitektur yang dapat dipergunakan sebagai preseden rancangan arsitektur di masa kini ataupun di masa mendatang.



Foto 3. Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar di Jalan Gajah Mada (Foto: I Dewa Gede Agung Diasana Putra)

#### ***4.4 Ekspresi dan Wujud Bangunan***

Ekspresi dan wujud bangunan merupakan faktor penting dalam perwujudan sebuah kawasan. Dalam hal ini, wujud bangunan ini seringkali dipergunakan sebagai preseden dalam pengembangan sebuah kawasan. Walaupun bukan contoh analisis preseden tetapi langkah pertama dalam proses mendeskripsikan dan memberi panduan (Jong and Voordt, 2002), merupakan langkah penting yang diperlukan sebelum menganalisis. Hal ini sangat penting untuk metode desain karena meletakkan dasar untuk mengintegrasikan pengalaman dari rencana sebelumnya ke dalam desain kontemporer.

Untuk mendapatkan gambaran umum dan wawasan tentang hasil, analisis preseden diuraikan dan dikembangkan menjadi sebuah jaringan semantik yang menghubungkan bentuk yang dirancang dengan penggunaan dan kinerja (Guney, 2008). Jaringan semantik adalah cara untuk merepresentasikan

hubungan antara entitas dan konsep dan umumnya digunakan dalam kecerdasan buatan, pemrograman komputer, dan linguistik. Pada saat yang sama hal ini dapat mendukung penciptaan dan pengembangan teoritis dalam metode desain; untuk mengintegrasikan pengetahuan desain generik dan eksplisit dalam desain kontemporer. Teknik jaringan semantik lebih dari sekedar gambaran hubungan; yang merepresentasikan analisis artefak, yang terdiri dari skala yang berbeda dari abstrak ke konkret secara keseluruhan (Guney, 2008).

Dengan melakukan analisa artefak, sebuah preseden arsitektur dapat dibangun untuk kemudian dapat dipergunakan dalam pengembangan desain selanjutnya. Dalam hal ini bangunan yang ada saat ini yang akan tetap dipertahankan seperti apa adanya, dipergunakan sebagai preseden kawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sentuhan pada fasade bangunan sehingga dapat menampilkan gaya bangunan yang *art deco*. Output dalam arsitektur adalah aset bangunan dan kemungkinan dampak lingkungannya. Oleh karena itu, pengembangan proses harus mencari produksi bangunan yang lebih tahan lama, efisien, kompatibel, ekonomis dan berfokus sosial serta mengatasi masalah seperti kepuasan pelanggan, tingkat kenyamanan, keselamatan dan kesehatan. Dalam hal ini, apapun yang diperoleh melalui suatu kegiatan dan proses operasional yang diperlukan, menentukan nilai dan tingkat usaha. Arsitektur berupaya memberikan solusi untuk mengembangkan dan meningkatkan kesesuaian antara arsitektur dan lingkungan melalui pertimbangan sosial, ekonomi, budaya, dan geografis dalam bentuk ekspresi bangunan.

Dalam hal ini, sesuai dengan konsep *art deco*, ekspresi bangunan (bentuk dan wujud) sebagai kesatuan komposisi, berupaya menampilkan bidang sederhana, permainan garis (dan bidang) vertikal dan horisontal menjadi unsur yang diulang. Arsitektur *art deco* sangat memperhatikan desain dekoratif, menjadikan fasad bangunan sebagai titik fokus. Arsitektur *art deco* adalah bagian dari arsitektur kolonial yang menonjol di Indonesia dari tahun 1920-an hingga 1940-an (Pranowo, 2014). Dalam hal ini, pengaruh *art deco* di Bali tidak terlepas dari pengaruh paham *historisisme* yang muncul dan digunakan oleh para arsitek berdasarkan sifat simbolis dan eklesiologisnya.

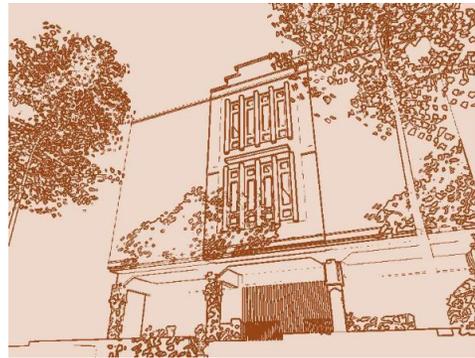
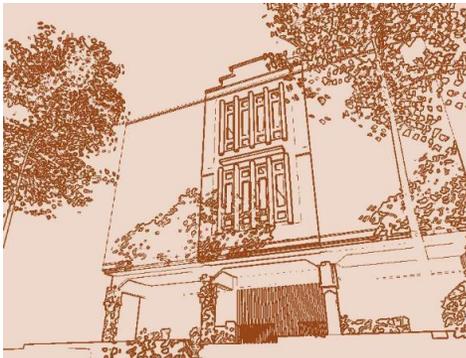
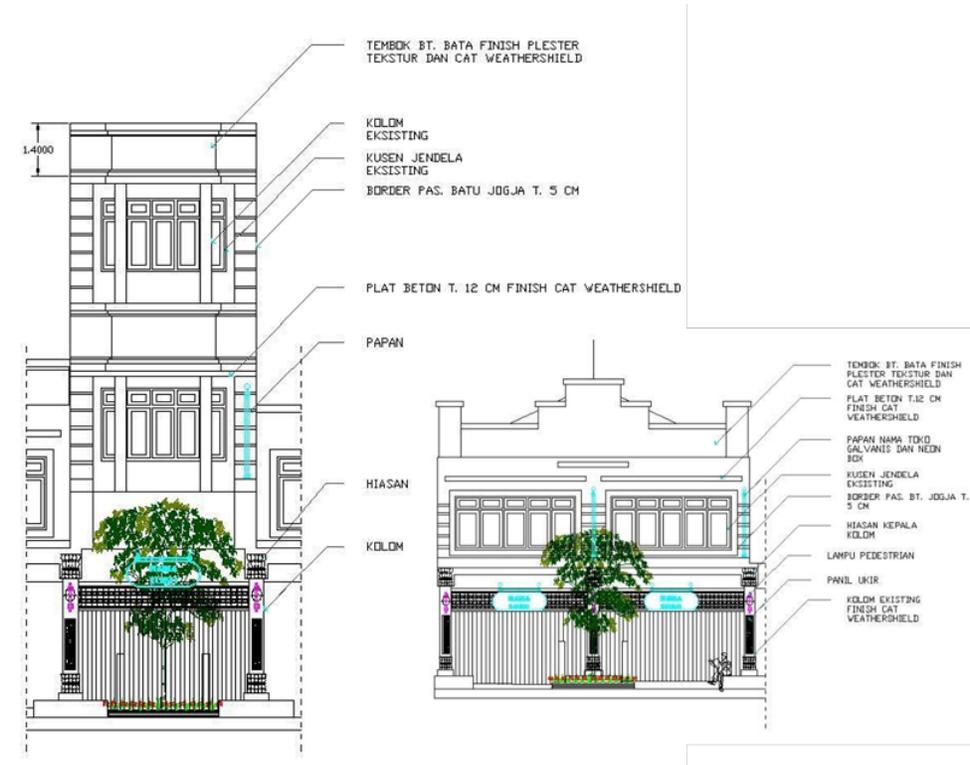
Aliran arsitektur ini dapat ditelusuri kembali ke masa kemegahan gereja sebelumnya dalam hal sosial ekonomi (Checa-Artasu, 2015). Dalam hal ini penggunaan model bunga pada kepala tiang di sepanjang koridor pusat perbelanjaan Jalan Gajah Mada menggambarkan sifat simbolis dalam arsitektur Bali. Model seperti ini menunjukkan bahwa aliran *historisisme*, mungkin tidak seperti gaya arsitektur lainnya, berupaya menyembunyikan keinginan untuk kembali ke masa lalu dengan akses yang berbeda terhadap modernitas (Gil,

1999). Dalam hal ini, penggunaan bentuk-bentuk tradisional ke dalam bangunan masa kini dapat dilihat sebagai pertemuan antara artefak sejarah masa lalu dengan aspek-aspek modern (Checa-Artasu, 2015).

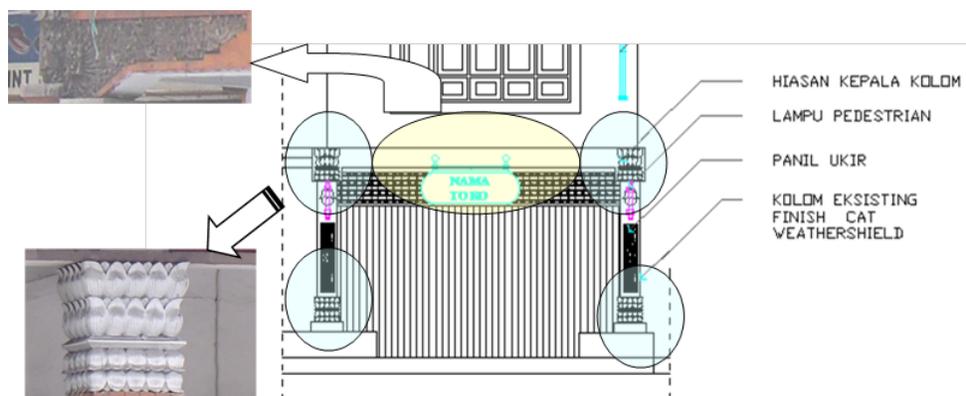
Sementara itu, berbagai bangunan di kawasan Jalan Gajah Mada yang dibangun setelah peristiwa yang dikenal dengan Puputan Badung terutama yang kemudian dijadikan kawasan perdagangan dan hotel menggunakan beton bertulang. Dalam hal ini, berbagai ornamen yang umumnya digunakan pada arsitektur tradisional Bali terutama tempat suci dan *puri* mulai dihilangkan dan diganti dengan permainan molding berupa penonjolan dinding bangunan yang sering disebut *pilaster* (Sumalyo, 1993). Penonjolan dinding juga digunakan untuk mengantisipasi iklim tropis berupa pergerakan matahari yang terjadi sepanjang tahun. Terkait dengan hal ini, dikaitkan pula dengan upaya untuk membentuk suasana ruang kota yang lebih rapi dan tertata (tolok ukur rancangan adalah nilai estetika ruang), maka pembentuk koridor Jalan Gajah Mada merupakan komposisi tampak bangunan, dengan permainan bidang *solid void*, dan gradasi *skyline* yang relatif datar, penggunaan bahan batu alam dan modern (Gambar 1).

Dalam upaya lebih meningkatkan kesan ekspresi bangunan, bahan yang dipergunakan adalah bahan batu alam yang berwarna putih atau krem yang dipadukan dengan cat warna putih sehingga memberikan kesan bangunan postmodern yang cenderung mengarah ke *art deco* lebih terasa. Untuk memberikan gradasi warna dan identitas pada bangunan, dilakukan pemberian warna yang bergradasi dari satu bangunan ke bangunan lainnya pada warna pintu depan.

Ornamen bangunan yang dipergunakan umumnya sangat sederhana sehingga terlihat sentuhan arsitektur tradisional Bali dalam bangunan baru. Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa ornamen yang cukup khas di kawasan ini adalah kepala kolom dan ornamen pada balok di sepanjang toko. Ornamen jenis ini terus dikembangkan untuk dijadikan ornamen yang menjadi ciri kawasan ini. Untuk memberikan pengakhiran pada kolom, maka kepala kolom yang berbentuk teratai juga diterapkan pada kaki kolom dan juga diterapkan pada landasan lampu pedestrian dan landasan lampu jalan (Gambar 2).



Gambar 1. Model perencanaan Kawasan Gajah Mada (Sumber: Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar, 2006)



Gambar 2. Model ornamen Kawasan Gajah Mada (Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar, 2006)

Disisi lain, untuk bangunan yang perkantoran maupun perdagangan tradisional seperti pasar, bangunan tradisional Bali dipergunakan sebagai preseden rancangan, hal ini dapat dilihat dengan bangunan Pasar Badung, Kantor Walikota Denpasar maupun bekas Puri Denpasar yang saat ini dipergunakan sebagai rumah Dinas Gubernur Bali yang kental dengan nuansa arsitektur tradisional Bali. Selain itu keberadaan Patung Catur Muka yang menggantikan fungsi jam di tengah-tengah *catus patha* memperkental nuansa tradisional pada bangunan fungsi baru di kawasan ini.

## 5. Simpulan

Karya arsitektur merupakan salah satu arsip budaya, di mana sebuah karya arsitektur di bawah otoritas politik mampu mengkomunikasikan keadaan sosial budaya, ekonomi, dan politik suatu populasi. Karya-karya arsitektur dapat dipergunakan sebagai preseden rancangan dalam pengembangan pembangunan sebuah kawasan. Dalam preseden seperti ini, budaya tradisional merupakan titik acuan yang dapat memperkaya perubahan sebuah rancangan kawasan dengan menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan kekinian sehingga kombinasi antara tradisional dan modernisasi akan menghasilkan sebuah karya perencanaan kawasan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa meninggalkan budaya dan rentetan kesejarahan kawasan.

Seiring dengan perkembangan relasi kekuasaan, terlihat peninggalan arsitektur di Kota Denpasar mencerminkan kontestasi kekuasaan dari masa ke masa. Sisa-sisa kebesaran dan identitas arsitektur masa kejayaan Kerajaan Badung seperti *catus patha* Kota Denpasar, Pura Satria maupun Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar. Di samping itu keberadaan Hotel Bali dan pertokoan sepanjang Jalan Gajah Mada mampu menunjukkan keberadaan masa kolonial di Denpasar yang berupaya menunjukkan identitasnya walaupun juga ada

upaya mengembangkan arsitektur tradisional di Museum Bali sebagai upaya mempertahankan budaya Bali.

Keberagaman karya arsitektur kolonial yang mengarah ke gaya *art deco* dan karya tradisional Bali di kawasan ini dapat dipergunakan sebagai preseden rancangan untuk pengembangan saat ini dan masa mendatang. Mengembalikan dan mengembangkan gaya *art deco* pada kawasan pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada dan pengembangan arsitektur tradisional Bali terutama gaya *bebadungan*. Gaya ini diterapkan pada bangunan perkantoran dan perdagangan tradisional untuk meningkatkan citra kawasan dalam upaya pengembangan kawasan Kota Denpasar sebagai kota pusaka.

### Daftar Pustaka

- Achmadi, A. (2010). Reading urban Bali : *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 44(2), 149–178.
- Adhika, I. M., & Putra, I. D. G. A. D. (2021). Reinvigorating cultural landscapes for planning cultural tourism in Bali. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 33(4), 1462–1469. <https://doi.org/10.30892/gtg.334spl03-594>
- Agung, A. A. G. P., Parimartha, I. G., Budharta, I. B. G., & Rama, I. B. (1986). *Sejarah Kota Denpasar 1945 - 1979*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. [http://repositori.kemdikbud.go.id/8207/1/SEJARAH\\_KOTA\\_DENPASAR\\_1945-1979.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/8207/1/SEJARAH_KOTA_DENPASAR_1945-1979.pdf)
- Amin, A., & Thrift, N. (2007). Cultural-economy and cities. *Progress in Human Geography*, 31(2), 143–161.
- Bıçakçı, A. B. (2012). Branding the city through culture : Istanbul , European. *International Journal of Human Sciences*, 9(1), 13–17.
- Brubaker, R., & Cooper, F. (2000). Beyond" identity". *Theory and Society*, 29(1), 1–47.
- Brunn, S., & Williams, J. F. (1983). *Cities of the World: Regional Urban Development*. Harper and Row.
- Budihardjo, E. (1986). *Architectural conservation in Bali*. Gajah Mada University Press.
- Castree, N. (2004). Differential geographies: Place, indigenous rights and "local" resources. *Political Geography*, 23(2), 133–167. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2003.09.010>
- Checa-Artasu, M. M. (2015). The Catholic Church and Neo-Gothic Architecture in Latin America: Scales for Their Analysis. In S. D. Brunn & D. A. Gilbreath (Eds.), *The Changing World Religion Map: Sacred Places, Identities, Practices and Politics* (pp. 2437–2451). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-9376-6>

- Claval, P. (1995). Space and creativity. «Belle Epoque» Paris: Genesis of a World-class artistic centre. In *Geography, history and social sciences*. (pp. 133–142). Springer.
- Colomb, C. (2011). Culture in the city, culture for the city? The political construction of the trickle-down in cultural regeneration strategies in Roubaix, France. *Town Planning Review*, 82(1), 77-98.
- Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar, (2006). *Laporan Penataan Kawasan Heritage Jalan Gajahmada*, Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.
- Dovey, K. (2009). *Becoming places: urbanism/architecture/identity/power*. Routledge.
- Dua, M. (2017). Globalisasi Ekonomi, Budaya Kapitalis dan Demokrasi. *Jurnal Ledalero*, 12(2), 355–372.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis* (Issue 7). WW Norton & company.
- Evans, G. (2001). *Cultural Planning: An Urban Renaissance?* Taylor & Francis e-Library.
- Firzal, Y. (2020). Redefining urban architecture in the decentralization era. *AIP Conference Proceedings*, 2230(1), 40004.
- Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class*. Basic Books.
- Garcia, B. (2004). Cultural policy and urban regeneration in Western European cities: lessons from experience, prospects for the future. *Local Economy*, 19(4), 312-326.
- Gauldie, S. (1969). *Architecture: The Appreciation of the Arts*. Oxford University Press.
- Geertz, C. (1980). *Negara*. Princeton University Press.
- Gelebet, I. N. (1998). *Arsitektur Tradisional Bali (Balinese Traditional Architecture)*. Bappeda Bali.
- Gibson, L., & Stevenson, D. (2004). Urban space and the uses of culture. *International Journal of Cultural Policy*, 10(1), 1–4.
- Gil, P. (1999). *El templo del siglo XX*. Editorial Serbal; Collegi d'arquitectes de Catalunya.
- Gleeson, B. 2003. (2003). Reflexive Modernization: The Re-Enlightenment of Planning? *International Planning Studies*, 5(1), 117–135.
- Griffiths, R. (2006). City-culture discourses: Evidence from the competition to select the European capital of culture 2008. *European Planning Studies*, 14(4), 415–430.
- Griffiths, R., Bassett, K., & Smith, I. (2003). Capitalising on culture: cities and the changing landscape of cultural policy. *Policy & Politics*, 31(2), 153-169.
- Guney, A. (2008). Architectural precedent analysis – A cognitive approach to morphological analysis of buildings in relation to design process. In K.

- M. M. Zarzar & A. Guney (Eds.), *Understanding meaningful environments – Architectural precedents and the question of identity in creative design* (pp. 91–115). IOS press.
- Handinoto. (1996). *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870 – 1940*.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Society*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40>
- Hardy, I. G. N. W., Setiawan, B., & Prayitno, B. (2016). Pengaruh Sistem Catur Wangsa terhadap Perwujudan Tata Spasial Kota Peninggalan Kerajaan Hindu di Bali: Kasus Kota Karangasem. *Jurnal Kajian Bali*, 06(02), 79–96.
- Immler, N. L., & Sackers, H. (2014). (Re)Programming Europe: European Capitals of Culture: Rethinking the role of culture. *Journal of European Studies*, 44(1), 3–29. <https://doi.org/10.1177/0047244113515567>
- Ismail, A. S. (2014). Architecture as an Expression of Political Ideology. *Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia*.
- Ismail, A. S., & Alice, D. (2008). Discourse of Democratic Architecture in Malaysia: An Analysis of Putrajaya Government Building in Comparison to Parliament Building. *Engaging Malaysia Modernity*, 50.
- Jong, T. M. de, & Voordt, D. J. M. van der. (2002). *Ways to study and research – Urban, architectural and technical design*. DUP.
- Kavaratzis, M. (2011). The Dishonest Relationship Between City Marketing and Culture: Reflections on the theory and the case of Budapest. *Journal of Town and City Management*, 1(4), 334-345.
- Klaasen, I. T., & Witberg, M. J. J. (1993). *Het stromend stadsgewest – Vormgeven aan de ecoregio Breda – Derde Eo Wijers–prijsvraag – Plananalyse*. TUDelft.
- Kraft, S. (2013). “Architecture is the mirror of every historical moment, we can see our time reflex on the buildings of our cities.” Interview with Daniele del Nero. Deconarch.Com. <http://www.deconarch.com/architecture-is-the-mirror-of-every-historical-moment-we-can-see-our-time-reflex-on-the-buildings-of-our-cities-interview-daniele-del-nero/>
- Lähdesmäki, T. (2014). European Capital of Culture Designation as an Initiator of Urban Transformation in the Post-Socialist Countries. *European Planning Studies*, 22(3), 481-497.
- Landry, C. (2000). *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. Earthscan.
- Landry, C. (2006). *The art of city-making*. Sterling, VA: Earthscan. Sterling, VA: Earthscan.
- Lefèbvre, H. (1992). *The Production of Space*. Blackwell.
- McGee, T. G. (1967). *The Southeast Asians City: A Social Geography of the Primate Cities of Southeast Asia*. G. Bell and Sons.

- Miles, M. (2007). Cities and cultures. In *Cities and Cultures*. <https://doi.org/10.4324/9780203001097>
- Miles, S., & Paddison, R. (2005). Introduction: The rise and rise of culture-led urban regeneration. *Urban Studies*, 42(5–6), 833–839.
- Monnet, J. (2011). The symbolism of place: A geography of relationships between space, power and identity. *Cybergeo: European Journal of Geography*.
- Muijzenberg, van den, Otto, & Wolters, W. (1988). *Conceptualizing Development of the Historical-Sociological Tradition in Dutch Non-Western Sociology*.
- Nordholt, H. G. C. S. (1986). *Bali: Colonial conceptions and political change 1700–1940. From shifting hierarchies to fixed order*.
- Nordholt, H. S. (1991). The *jago* in the shadow. Crime and “order” in the colonial state in Java. In *R I M A: Review of Indonesian and Malaysian Affairs: a semi-annual survey of political, economic, social and cultural aspects of Indonesia and Malaysia* (Vol. 25, Issue 1, pp. 74–91).
- Noviyanti, R. (2021). Revolusi Industri dan Pengaruhnya pada Penelitian Sejarah. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah.*, 4(2), 1–8.
- Nursyahbani, R., & Pigawati, B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 4(2), 267–281.
- Paramitha, I. A. D., Kastawan, I. W., & Widiastuti. (2017). Nilai Signifikansi Cagar Budaya Hotel Inna Bali Jalan Veteran Denpasar. *Space*, 4(3), 113–128.
- Parimin, A. P. (1986). *Fundamental study on spatial formation of island village: environmental hierarchy of sacred-profane concept in Bali*.
- Pasman, G. J. (2003). *Designing with precedents*, . Faculty of Industrial Design.
- Picard, M. (1996). *Bali: cultural tourism and touristic culture*. Archipelago Press.
- Pranowo, L. (2014). *Tipologi Fasad Art Deco pada Bangunan-bangunan di Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Pratt, A. C. (2010). Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development a critical reading of the UK experience. *City, Culture and Society*, 1(1), 13–20. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2010.04.001>
- Prestel, J. Ben. (2016). *Paris Everywhere? The Challenge of Eurocentrism in Global Urban History*. [www.globalurbanhistory.com](http://www.globalurbanhistory.com).
- Putra, I. D. G. A. D., Lozanovska, M., & Fuller, R. (2013). The Transformation of the Traditional Balinese House for Tourist Facilities: Managing a Home-Based Enterprise and Maintaining an Architectural Identity. *Asia Pacific Management and Business Application*, 2(2). <https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2013.002.02.4>

- Putra, I. D. G. A. D., Lozanovska, M., & Fuller, R. (2019). From spiritualistic toward more pragmatic pattern: Re-ordering Balinese houses and viability of the household traditions in the tourism economy. *Journal of Architecture and Urbanism*, 43(1). <https://doi.org/10.3846/jau.2019.3692>
- Putra, I. D. G. A. D., & Wirawibawa, I. B. G. (2020). The Balinese Palaces in Gianyar : Representing Authority Power and Creating Territorial Identity. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(8), 132–150.
- Putra, I. G. M. (2005). Catuspatha, Konsep, transformasi dan Perubahan. *Journal Permukiman Natah*, 3(2), 62–101.
- Rao, H., Monin, P., & Durand, R. (2003). Institutional change in Toque Ville: Nouvelle cuisine as an identity movement in French gastronomy. *American Journal of Sociology*, 108(4), 795–843.
- Sacco, P. L., Blessi, G. T., & Nuccio, M. (2009). Cultural policies and local planning strategies: what is the role of culture in local sustainable development? *Journal of Arts Management, Law, and Society*, 39(1), 45–64.
- Sacco, P. L., & Crociata, A. (2013). A conceptual regulatory framework for the design and evaluation of complex, participative cultural planning strategies. *International Journal of Urban and Regional Research*, 37(5), 1688–1706. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01159.x>
- Sasmita, T. (2020). Potential of Denpasar City “Zero Point” for Denpasar City Tour Package Development. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 111, 99–102. <https://doi.org/10.2991/icoborot-18.2019.15>
- Satria, M. W., & Putra, I. D. G. A. D. (2020). The Kori Agung Character of Heritage Temples: The Architectural References of Klungkung Identity. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(1).
- Schön, D. (2009). *The reflective practioner — How professionals think in action*. Ashgate Publishing.
- Seramasara, I. G. N., & Trisnawati, I. A. (2019). Bali’s cultural arts and the contest of identity during the tourism era of Bali. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(4), 109–120.
- Setyowati, A. D. (2011). *Pengaruh Industrialisasi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Proses Urbanisasi di Jawa Tengah Tahun 1990-2005*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Stevenson, D. (2004). Civic Gold Rush. Cultural planning and the politics of the Third Way. *International Journal of Cultural Policy*, 10(1), 119-131.
- Sumalyo, Y. (1993). *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Suyadnya, I. (2011). Securitization, Belonging and Politics of Belonging in Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 1(1), 73–87.

- Tarnutzer, A. (1995). Kota Denpasar: 'The Making of a Balinese Colonial Town',. In B. Werlen & S. Wälty (Eds.), *Kulturen und Raum: Theoretische Ansätze und empirische Kulturforschung in Indonesien* (pp. 245–265). Verlag Rüegger AG.
- Tjiptoherijanto, P. (2016). Urbanisasi Dan Pengembangan Kota Di Indonesia. *Populasi*, 10(2), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jp.12484>
- Tretter, E. M. (2009). The cultures of capitalism: Glasgow and the monopoly of culture. *Antipode*, 41(1), 111–132. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2008.00658.x>
- Triyuni, N. N., Ginaya, G., & Suhartanto, D. (2019). Catuspatha Spatial Concept in Denpasar City : Toward Multiculturalism and Cultural Tourism. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 5(3), 18–31. <https://sloap.org/journals/index.php/ijllc/>
- Tzonis, A. (1992). Huts, ships and bottle racks — designed by analogy for architects and/or machines. In N. Cross, K. Dorst, & N. Roozenburg (Eds.), *Research in design thinking* (pp. 139–164). Delft University Press.
- Vakili-Ardebili, A., & Boussabaine, A. H. (2006). Quality concept in Persian precedent architecture: A lesson in eco-building design. *PLEA 2006 - 23rd International Conference on Passive and Low Energy Architecture, Conference Proceedings, September*, 6–8.
- Van Oers, B. (1998). From context to contextualizing. *Learning and Instruction*, 8(6), 473–488. [https://doi.org/10.1016/S0959-4752\(98\)00031-0](https://doi.org/10.1016/S0959-4752(98)00031-0)
- Vickers, A. (1996). Modernity and being modern: an introduction. In A. Vickers (Ed.), *Being modern in Bali: image and change* (pp. 1–37). Monograph 43/ Yale University Southeast Asia Studies.
- Weber, K., Heinze, K. L., & DeSoucey, M. (2008). Forage for thought: Mobilizing codes in the movement for grass-fed meat and dairy products. *Administrative Science Quarterly*, 53(3), 529–567.
- Wertheim, W. F., & Kraal, J. F. (1958). *Indonesian Town: Studies in Urban Sociology*. van Hoeve, The Hague and Bandung.
- Wiener, M. J. (1995). *Visible and Invisible Realms: Power, Magic, and Colonial Conquest in Bali*. University of Chicago Press.
- Wiryomartono, A. B. (1995). *Seni Bangunan dan Seni Bina kota di Indonesia*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Worsley, P. (2019). The Rhetoric of Paintings: Towards a History of Balinese Ideas, Imaginings and Emotions in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 9(1), 35. <https://doi.org/10.24843/jkb.2019.v09.i01.p02>

- Wry, T., Lounsbury, M., & Glynn, M. A. (2011). Legitimizing nascent collective identities: Coordinating cultural entrepreneurship. *Organization Science*, 22(2), 449–463.
- Yudantini, N. M., Darma, K. A. S., & Wiryawan, W. (2017). Sejarah dan Perkembangan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya. *Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, 1, B177–B184. <https://doi.org/10.32315/sem.1.b177>
- Yulianto, A., & Wibowo, K. (2017). Pengaruh Jalan Lingkar Luar terhadap Perkembangan Wilayah di Kota Palangkaraya Ditinjau dari Tata Guna Tanah. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Dalam Pengembangan SmartCity.*, 1(1), 94–107.
- Yusiana, L. S. (2016). Konsep Interpretasi Guna Melestarikan Tapak Sejarah di Pecinan Jalan Gajah Mada, Denpasar. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 2(2), 165. <https://doi.org/10.24843/jal.2016.v02.i02.p07>
- Zhuanqing, C. (2010). The Strategic Research on Zhongyuan Culture and City Brand Marketing. *The International Marketing Science and Management Technology Conference*.

## Profil Penulis

**Ida Bagus Gde Wirawibawa** adalah dosen di Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana sejak 1991 dengan jenjang Pendidikan S1 (Arsitektur FT Universitas Udayana, 1988), S2 (Magister Teknik bidang Arsitektur-Permukiman, ITS Surabaya tahun 1997) dan S3 (S3 Kajian Budaya Universitas Udayana tahun 2012). Aktif mengajar di Program Sarjana (S1) Arsitektur, Program Magister Arsitektur, dan Program Studi Doktor Ilmu Teknik Fakultas Teknik Universitas Udayana. Bidang penelitian yang digeluti adalah arsitektur tradisional Bali, arsitektur dan lingkungan dan arsitektur budaya.

**I Dewa Gede Agung Diasana Putra** adalah dosen di Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana sejak 1997 dengan jenjang Pendidikan S1 (Arsitektur FT Universitas Udayana, 1996), S2 (Magister Teknik bidang Teknologi Bangunan, ITB Bandung tahun 2000) dan S3 (School of Architecture and Built Environment, Deakin University Australia tahun 2015). Aktif mengajar di Program Sarjana (S1) Arsitektur, Program Magister Arsitektur, dan Program Studi Doktor Ilmu Teknik Fakultas Teknik Universitas Udayana. Bidang penelitian yang digeluti adalah sosial budaya dan eko-teknologi dalam arsitektur, teknologi bangunan, bangunan hijau dan politik dalam arsitektur.